



MDPI

NEWSLETTER

HAPPY PEOPLE, MANY FISH

June 2019, Issue 06 - www.mdpi.or.id - info@mdpi.or.id



LANGKAH AWAL: Pertemuan tentang Penggunaan Data CDT berlangsung di Manado, Sulawesi Utara dan dihadiri oleh DKP Sulut dan pemangku kepentingan lainnya.

MDPI Memfasilitasi Pertemuan Awal tentang Penggunaan Data CDT

MANADO-MDPI memfasilitasi pertemuan awal tentang penggunaan Catch Documentation and Traceability (CDT) Data untuk meningkatkan manajemen perikanan di Indonesia. Pertemuan tersebut diadakan di Manado, Sulawesi Utara pada 7 Mei yang lalu.

Pertemuan ini merupakan langkah awal dari kemitraan antara Yayasan MDPI dan USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) dengan mitra lain dalam menentukan bagaimana data yang dikumpulkan dapat divisualisasikan dan ditafsirkan untuk tujuan manajemen, meningkatkan pemahaman data, dan memberdayakan masyarakat dalam proses manajemen.

Secara khusus, kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan alat visualisasi untuk interpretasi data dan membangun kapasitas pemangku kepentingan untuk menggunakan alat ini untuk tujuan pengelolaan.

Pertemuan pendahuluan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara, Coral Triangle Initiative (CTI), akademisi, industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Diharapkan dengan pertemuan awal ini, data akan lebih mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan oleh karena itu dapat digunakan dalam menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang status perikanan. MDPI juga mengucapkan terima kasih kepada CTI atas dukungan yang memungkinkan pertemuan terjadi.

ADA APA DI EDISI KALI INI?

- Yayasan MDPI memfasilitasi pertemuan awal tentang Penggunaan Data CDT di Manado, Sulawesi Utara.
- Aliansi tuna baru, ICTSA, diluncurkan di acara Seafood Expo Global di Brussels, Belgia.
- 147 nelayan Fair Trade Buru Utara menerima dokumen BPKP yang diserahkan di FCMC Provinsi Maluku.

UNTUK KEBERLANJUTAN: Tim MDPI yang menghadiri pertemuan awal di Manado, Sulut.





ALIANSI BARU: Perwakilan MDPI, IPNLF, dan AP2HI saat peluncuran di Brussels.

Aliansi Tuna 'One-by-One' Indonesia Diluncurkan di Belgia

BRUSSELS- Aliansi tuna baru, yakni Aliansi Tuna 'One-by-One' Indonesia, diluncurkan di Seafood Expo Global di Brussels, Belgia pada 9 Mei. Tiga organisasi, Yayasan MDPI, IPNLF dan AP2HI sepakat untuk berkolaborasi lebih dekat dalam mendukung dan meningkatkan perikanan tuna 'one-by-one' di Indonesia.

Aliansi ini didukung oleh donor dan organisasi internasional, termasuk USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans), yang mulai bekerja dengan aliansi ini sejak 2017 untuk membuat konsep dan meluncurkan inisiatif. USAID Oceans, program lima tahun yang bekerja di seluruh Asia Tenggara untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, melestarikan keanekaragaman hayati laut, dan membawa perhatian pada aspek manusiawi perikanan, bergabung dengan Walton Foundation dan UNIDO dalam mendukung aliansi ini.

Setelah terbentuk, aliansi ini akan segera memfokuskan upayanya pada integrasi teknologi yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan (eCDT) dari rantai pasok tuna Indonesia dan sekaligus sebagai bentuk persiapan untuk sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC).



MEET OUR STAFF

Wahyu Teguh Prawira, saat ini menjadi Koordinator Traceability di bawah program Supply Chain di MDPI. Teguh, begitu dia akrab disapa, sangat menikmati tempat-tempat terpencil yang menjadi wilayah kerja dari MDPI. Selain itu, dia juga sering menghabiskan waktu luangnya bersama putri semata wayangnya. Dia menghabiskan waktu bermain di taman kota atau sekadar pergi ke pantai untuk menikmati suasana alam.

147 Nelayan di Maluku Terima Dokumen BPKP

AMBON- Sebanyak 147 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) atau dokumen registrasi kapal penangkap ikan secara resmi diberikan kepada nelayan Fair Trade dari Buru Utara, Provinsi Maluku.

Acara pemberian dokumen tersebut diadakan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku pada 9 Mei. Dokumen tersebut diserahkan oleh Direktur Eksekutif MDPI Saut Tampubolon dan Kepala Bidang Perikanan DKP Provinsi Maluku Ahmad Umarela di Fisheries Co-Rapat Komite Manajemen (FCMC).

Dengan memiliki dokumen BPKP, itu berarti bahwa para nelayan juga berkontribusi untuk memerangi penangkapan ikan ilegal atau IUU fishing.

FCMC itu sendiri memfasilitasi semua pemangku kepentingan di bidang perikanan untuk dapat berbagi isu-isu terbaru dan pembaruan, memungkinkan pendekatan kolaboratif untuk pengelolaan perikanan. Kali ini, FCMC juga membahas pedoman untuk mengimplementasikan FCMC untuk Provinsi Maluku. Di akhir kegiatan, peserta juga menyusun rencana aksi bersama.



DOKUMEN RESMI: Para nelayan berfoto usai mengikuti kegiatan FCMC. Photo: MDPI.